

Ketegangan Antaretnis, Orang Bugis, dan Masalah 'Penjelasan'¹

Kathryn Robinson
(The Australian National University)

S eminggu sesudah kerusuhan di Kupang NTT pada tgl. 30 November 1998, tajuk rencana yang berjudul 'Eksodus dari Kupang' terbit dalam surat kabar *Pedoman Rakyat* di Ujung Pandang (sekarang Makassar) dengan berita sbb.:

Sebanyak 405 warga Sulawesi Selatan yang selama ini bermukim secara damai di Kupang NTT, Jumat tiba di Ujung Pandang menumpang KM Sirimau. Di Ujung Pandang mereka

diterima secara resmi oleh Wagub Darnadi Ch dan kemudian diantar langsung pulang ke kampung halaman oleh aparat Pemda... Mereka meninggalkan Kupang untuk menghindari kerusuhan yang merebak di Ibukota NTT itu hari Minggu lalu. Dari mereka diperoleh keterangan bahwa tidak ada niat mereka meninggalkan Kupang untuk selamanya. Dengan tetangga, mereka selalu hidup rukun dan damai, tidak ada permusuhan.

Warga Sulawesi Selatan yang berdiam di Kupang sebenarnya telah menjadi penduduk pemegang KTP Kupang. Banyak di antara mereka yang lahir di Kupang, beranak pinak di sana dan tentu mencari nafkah yang halal di sana. Seperti juga dengan perantau Bugis lainnya, kalau tidak menjadi nelayan, maka mereka akan duduk di pasar atau membuka toko sebagai pedagang. Itulah orang Sulawesi Selatan yang merambah seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke.

Sukses masyarakat Sulawesi Selatan di rantau memang banyak yang membuat iri penduduk setempat... Masyarakat Sulawesi Selatan yang mewarisi bakat bahari dan kemampuan mereka, telah menjadi 'tuan tanah' yang memiliki kemampuan lebih dibanding penduduk di sekitarnya...

Sejak Indonesia merdeka, malah jauh sebelum itu, ketika masyarakat Sulawesi Selatan sudah bermukim di Nusa Tenggara Timur... kehidupan mereka tetap rukun bersama penduduk setempat. Tidak ada huru-hara, tidak ada intimidasi yang menyebabkan eksodus seperti saat ini.

Maka apabila tiba-tiba terjadi huru-hara di Kupang, dugaan adanya pihak ketiga yang menjadi penyebab kerusuhan itu, kiranya perlu ditelusuri dan dibuktikan. Ada yang mengkaitkan tragedi Kupang dengan peristiwa Ketapang di Jakarta. Kedua peristiwa itu berhubungan dengan masalah SARA dan keduanya diduga direkayasa oleh kelompok tertentu yang tidak menghendaki Indonesia aman. Mereka memanfaatkan isu SARA yang memang sensitif untuk kepentingan politik mereka.

Harapan kita, inilah peristiwa kekerasan yang terakhir. Sebab pada saat ekonomi nasional mengalami guncangan yang amat dahsyat, diperlukan keteduhan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha (*Pedoman Rakyat Minggu* 6 Desember 1998).

Harapan yang dikemukakan bahwa kasus ini merupakan peristiwa kekerasan yang terakhir, ternyata tidak terpenuhi. Walaupun keadaan di Kupang cepat didamaikan oleh Pemerintah Daerah di tingkat propinsi, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama tidak sampai tiga minggu sesudahnya, kerusuhan di Kota Ambon pun meletus. Kerusuhan ini semula dilaporkan sebagai konflik di antara penduduk lokal dan pendatang dari Sulawesi, yang disebut BBM, istilah yang sebenarnya 'meremehkan' kelompok etnis Bugis, Bajo, dan Makassar. Kerusuhan itu, yang hingga saat ini belum terselesaikan secara damai, cepat meluas menjadi bentrokan di antara golongan Kristen dan Islam (termasuk pemeluk Islam lokal). Akibatnya, timbul gelombang baru pengungsi yang kembali ke Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Pengungsi melarikan diri dari situasi kekerasan dan teror yang mengakibatkan korban, baik nyawa maupun harta di kedua belah pihak. Kesimpulan atau penjelasan yang dikemukakan atas peristiwa tersebut mencerminkan asumsi bahwa kekerasan di kasus Kupang didasarkan atas SARA. Istilah ini dimanfaatkan rezim Orde Baru dengan tujuan mencegah kegiatan massal, dan merupakan ucapan politik berdasarkan identitas (suku, ras, agama dan antargolongan,

¹ Tulisan ini merupakan terjemahan dari versi berbahasa Inggris dengan judul: 'Inter Ethnic Violence, The Bugis and the Problem of Explanation' yang dipresentasikan dalam panel tentang: 'Bhinneka Tunggal Ika': Masih Mungkinkah? dalam Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA: 'Mengawali Abad ke-21: Menyongsong Otonomi Daerah, Mengenal Budaya Lokal, Membangun Integrasi Bangsa', Universitas Hasanuddin, Makassar, 1-4 Agustus 2000. Terima kasih pada Emmy Oey atas bantuannya dalam menerjemahkan tulisan ini ke dalam bahasa Indonesia dan pada staf Redaksi Jurnal Antropologi Indonesia dalam menyempurnakan naskah terjemahan ini. Tulisan ini telah diterbitkan dalam Jurnal Antropologi Indonesia 24 (63): 45-53.

yang dianggap sebagai identitas primordial)². Kecemburuan orang lokal terhadap suksesnya migran di bidang ekonomi juga ditekankan sebagai pemicu kerusuhan dan kekerasan di Kupang. (Faktor itu muncul lagi dalam pembahasan ketegangan di Ambon.)

Timbullah pertanyaan lebih lanjut dalam diri saya: 'Bagaimana rasa cemburu diwujudkan sebagai kekerasan yang sangat tidak berperikemanusiaan terhadap warga setempat, bahkan seringkali tetangga sendiri, bukan hanya untuk merusak harta mereka, melainkan juga untuk membunuhnya?' Pertanyaan yang sama juga dikutip wartawan Margot Cohen dari seorang anak Bugis, pengungsi dari Ambon yang diketemukan di kampung di Kabupaten Barru.

Just a few months ago the Muslim children were sharing secrets with their Christian friends. Now they don't know who to trust. 'They chased us away,' says Nur. 'If we met them again, what would we say?' (Cohen 1998).

Hanya beberapa bulan lalu, anak-anak Islam itu masih berbagi rahasia dengan kawan-kawannya yang beragama Kristen. Sekarang, mereka tidak tahu siapa yang dapat mereka percayai. 'Kami diusir mereka,' kata Nur. 'Kalau kami bertemu mereka, apa yang akan kami katakan?' (Cohen 1998).

Ternyata, ada kesamaan di antara kondisi kekerasan jaman ini (pasca Orde Baru) dengan pembunuhan massal pada jaman pasca Orde Lama/Gestapu (pada kedua penutupan zaman). Analisis yang rinci mengenai peristiwa Gestapu dan sesudahnya masih sangat terbatas. Misalnya, belum diketahui dengan persis jumlah orang yang dibunuh, dan siapa-siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Dalam buku mengenai pembunuhan massal itu, yang diterbitkan pada tahun 1990, Robert Cribb menyebutkan masalah tidak ditemukannya kuburan massal—seperti di Yugoslavia— sebagai salah satu sebab yang menghalangi pemahaman lebih mendalam mengenai peristiwa itu. Tetapi, pada era reformasi, masyarakat dapat menunjukkan adanya beberapa kuburan massal di beberapa lokasi (terutama Jawa Timur). Saya dapat membayangkan bahwa kuburan massal itu menjadi tanda peringatan bagi masyarakat setempat tentang pembunuhan massal yang tidak dibahas secara terbuka, tetapi sebaliknya menjadi 'rahasia umum' bahwa pembunuhan massal mencerminkan simbol kekuasaan Orde Baru, dan kemungkinan bahwa rezim akan menggunakan kekerasan lagi terhadap siapa-siapa yang melawan kekuasaannya.

Pada umumnya, analisis terhadap pembunuhan massal pada tahun 1965 terfokus pada konflik antar kelas di pedesaan, yakni konflik antara pemilik tanah dan penggarap, terutama di Jawa, sebagai akibat dari aksi sepihak yang dilaksanakan oleh gerakan massal PKI. Analisisnya terfokus pada masalah struktur sosial yang mengakibatkan konflik

mengenai harta benda. Penjelasan mengenai pembunuhan dan kekerasan pada era reformasi (misalnya di Kupang dan Ambon) juga menekankan faktor struktur sosial, tetapi lebih mengutamakan konflik di antara kelompok berdasarkan sukubangsa atau agama. Seolah-olah, pengelompokan berdasarkan suku-bangsa/agama dianggap hal yang alamiah, sesuatu yang mendasar, yang selalu akan mengemuka atau terwujud kalau tidak dicegah oleh yang menguasai.³

Penjelasan ilmiah yang didasarkan pada pendekatan yang menekankan faktor struktural sebagai pemicu kekerasan, kurang memadai. Walaupun pendekatan ini dapat menjelaskan bentuk atau dasar kelompok sosial yang saling bermusuhan, ia tidak dapat menjelaskan mengapa hingga ada individu-individu (dari kelompok sosial lain, misalnya kelompok berdasarkan agama atau budaya/etnis), yang hidup (sebagai warga atau penduduk setempat, sebagai warga negara dan sebagainya) dalam kondisi yang sama (dari segi ekonomi dan sebagainya) dan dengan damai, tiba-tiba dapat saling membunuh. Ada kecenderungan, para komentator/penganalisis mengemukakan penjelasan berdasarkan analisis primordialisme, yaitu bahwa ada faktor budaya yang tidak dapat diubah (misalnya bahwa orang Indonesia mudah 'mengamuk').

Antropolog Michael Taussig (1987) yang melaksanakan penelitian di Columbia saat negara itu masih dikuasai rezim yang menggunakan kekerasan, mengemukakan suatu pertanyaan yang tepat: 'Bagaimana rasa takut bisa mendarah daging (*How does fear get a grip on the human heart*)?' Persoalan yang harus ditelusuri oleh ilmuwan adalah apakah dasar dari teror yang dilakukan masyarakat biasa, yang dulu hidup dengan rukun dan damai?

Seharusnya, kita memberikan perhatian secara lebih serius atau membuka 'rahasia umum' yang menjadi dasar tumbuhnya Orde Baru, yaitu pembunuhan massal yang terjadi pada tahun 1965. Ancaman komunis dimanfaatkan sebagai dasar legitimasi rezim Orde Baru, tetapi pembunuhan massal pada waktu itu tidak diungkapkan pada umum, secara terbuka.

Saya akan kembali ke pertanyaan yang menyangkut dasar penjelasan ilmu sosial atas terjadinya teror, tetapi terlebih dahulu saya ingin mengulas latar belakang migrasi orang Sulawesi, terutama Orang Bugis. Kebiasaan orang Sulawesi Selatan merantau untuk mencari nafkah menjadi dasar suatu stereotipe negatif yang menjadi alasan untuk menindas mereka di daerah perantauan. Untuk melawan stereotipe negatif itu, saya akan menjelaskan pendekatan orang Bugis terhadap migrasi/perantauan.

³ Seolah-olah bangsa dan negara Indonesia adalah sejenis negara yang dibangun di atas perbedaan sosial dan budaya yang tidak akan berubah, dan yang selalu akan ada sebagai lawan perasaan kebangsaan. Dalam bahasa Inggris, istilah yang lazim dipakai untuk hal ini adalah *primordialism*.

² Konsep 'primordialisme' akan dibahas dalam tulisan ini, lihat hal. 46 dan 50.

Migrasi Bugis

Sejak abad keenambelas, orang Bugis cenderung ke luar dari daerah asalnya, merantau ke seluruh nusantara, hingga ke Australia dan Muangthai. Pelras (1998), antropolog asing yang paling terkenal sebagai penggemar budaya Bugis mempertahankan pendapatnya bahwa sukubangsa Bugis bersifat modern sejak sekitar abad 17, dan minat untuk migrasi merupakan salah satu aspek dari sifat modern itu.

Hal yang menarik, Tajuk Rencana *Pedoman Rakyat* yang dikutip di atas menggambarkan orang Sulawesi sebagai perantau, bukan sebagai pendatang atau migran. Merantau, atau *lao sompe* ('naik perahu') dalam bahasa Bugis, dilegitimasi oleh beberapa aspek budayanya.

Menurut Mochtar Naim (1979:2), merantau merupakan sejenis migrasi dengan konotasi budaya yang tidak gampang diterjemahkan, misalnya dalam Bahasa Inggris. Menurut Naim (1979:3), merantau mencakup enam unsur:

- meninggalkan kampung halaman;
- dengan kemauan sendiri (misalnya, tidak seperti transmigrasi dulu, saat migrasi diurus oleh pemerintah);
- untuk jangka pendek atau panjang;
- dengan tujuan mencari nafkah, pengalaman atau pengetahuan;
- biasanya dengan niat untuk pulang ke kampung; dan
- berdasarkan unsur-unsur budaya.

Menarik juga bahwa dalam Tajuk Rencana *Pedoman Rakyat*, perantau di Kupang digambarkan sebagai warga Sulawesi, walaupun mereka sudah lama menjadi penduduk resmi di perantauan, mempunyai tanah dan KTP di situ.

Sifat-sifat Bugis lain yang mau dipertahankan oleh Pelras (1998: 21-22) sebagai sifat modern adalah:

- perkembangan pemikiran yang sangat bersifat rasional, dikaitkan dengan inovasi teknologi dan kemajuan pengetahuan, terutama dalam budaya maritim, misalnya pembuatan perahu, navigasi dan astronomi;
- pergeseran dari produksi untuk keperluan pribadi ke produksi untuk pasar;
- menekankan hak dan kewajiban individu;
- pergeseran dari masyarakat berdasarkan kekerabatan ke masyarakat berdasarkan hubungan antara individu dan kelompok (dalam politik kerajaan, tetapi juga dalam kegiatan ekonomi, misalnya hubungan antara atasan dan bawahan—hubungan *pongawa sawi*—yang digambarkan oleh Mattulada 1975 sebagai sistem manajemen Bugis);
- memeluk sistem pemikiran yang meluas (*world wide system of thought*), misalnya agama Islam; dan
- hubungan yang makin lama makin mendalam dengan dunia di luar pulau kecilnya, Sulawesi, melalui perdagangan, agama dan lain-lain.

Tetapi, menurut Acciaioli (1989), budaya merantau orang Bugis tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang tetap,

yang tidak berubah, yang direproduksi secara utuh dari abad ke abad. Dia menjelaskan beberapa peristiwa dalam sejarah Sulawesi Selatan yang mendorong orang Bugis meninggalkan Sulawesi, misalnya jatuhnya kerajaan Gowa pada abad 17, perang selanjutnya antara Bone dan kerajaan Bugis yang lain, peningkatan kekuasaan pemerintah kolonial, dan gerombolan Darul Islam. Semuanya ini mengakibatkan gelombang migrasi dari Sulawesi Selatan.

Walaupun pada masa lalu perantau Bugis mengambil peranan penting dalam kekuasaan di beberapa lokasi di nusantara ini (seperti yang digambarkan dalam naskah Melayu *Tuhfat al Nafis*), pada zaman ini, hal itu tidak lagi terjadi. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Amiruddin menuturkan bahwa di Sulawesi orang Bugis menjadi petani, nelayan dan pedagang kecil. Mereka merantau untuk mencari rezeki, dan masih tetap menjadi petani, nelayan dan pedagang kecil. Sering dipersoalkan oleh kaum intelektual di Sulawesi Selatan, mengapa peranan orang Bugis di panggung nasional—baik di bidang politik maupun ekonomi—begitu terbatas? Karena itu dapat dipahami mengapa mereka mengeluh-elukan Presiden Habibie sebagai salah satu anak daerah yang berhasil mengambil peranan penting di tingkat nasional. Menurut Pelras (1998:20),

although '...the Bugis are usually represented as fierce seafaring people, formerly involved in slave trade and piracy...a closer look at their history reveals that only a small proportion of them have ever been involved in maritime activities, and almost none in piracy, while trade, cash crop production and rice cultivation have been central to their economy.'

walau '...orang Bugis selalu direpresentasikan sebagai pelaut yang berani dan kejam, yang pada masa lalu terlibat dalam perdagangan budak belian dan bajak laut...suatu pemahaman yang lebih mendalam pada sejarahnya menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil di antara mereka pernah melibatkan diri dalam kegiatan maritim, dan hampir tidak ada yang menjadi bajak laut, sementara perdagangan, produksi tanaman keras, dan pertanian merupakan inti kegiatan ekonominya.'

Kegiatan semacam itu dilanjutkan di rantau. Stereotipe orang Bugis cenderung memberikan penilaian negatif atas keberhasilan mereka sebagai migran. Yang ditekankan ialah persaingan di antara mereka dan masyarakat setempat (terutama persaingan atas sumberdaya alam). Misalnya, dari Ambon terdapat persepsi yang bervariasi. Seorang Kristen Ambon mengemukakan tanggapan melalui internet: dia mengeluh bahwa orang Sulawesi Selatan mengambil peran penting di lapangan kerja tertentu, sebagai sopir kendaraan umum, tukang becak dan berdagang di pasar. Seolah-olah penduduk setempat 'diusir' dari lapangan pekerjaan itu. Tetapi, dari sudut pandang orang Sulawesi, mereka mengambil peran di sejumlah lapangan pekerjaan yang tidak diisi oleh penduduk setempat, misalnya membersihkan kota (selain dari transpor dan pasar). Pandangan orang Sulawesi sendiri terhadap perantauan lebih menekankan pada kegiatan usaha dan penderitaan yang dialami, mengorbankan diri untuk meningkatkan status sosialnya.

Di kota tambang Soroako tempat saya melakukan penelitian sejak tahun 1976, sejak awal mula proyek itu

dibangun, pasar dikuasai oleh orang Bugis. Kebanyakan dari mereka adalah pedagang kecil, yang tidur di pasar di atas kain dagangan, memasak di kompor di tempat mereka berjualan, dan mandi di danau. Mereka senang bercerita bagaimana mereka berusaha, mulai dengan modal kecil hingga sedikit demi sedikit mereka dapat meningkatkan usahanya. Lagu-lagu Bugis mengenai migrasi sering menekankan penderitaan, kerelaan mengorbankan diri agar berhasil. Migran yang baru kembali dari Kupang pun menganggap bahwa dia telah berusaha, menghimpun modal sedikit demi sedikit hingga sanggup membeli tanah secara resmi di Kupang, membangun rumah dan tempat usaha. Hasil dari segenap usahanya itu pun hilang dalam kerusuhan yang lalu.

Pelras (1998) mengatakan bahwa ada unsur-unsur budaya Bugis yang seolah-olah bertentangan. Mereka bersifat individualis berdasarkan keinginan naik status bagi diri masing-masing, tetapi masyarakat Bugis juga berdasarkan sistem status tradisional yang sangat kuat.

Their strong sense of individuality is the more striking if one takes account of the fact that Bugis society is one of the most complex and apparently rigidly hierarchical in the archipelago, with distinct strata comprising several degrees of nobility, whose highest members are white-blooded descendants of pre-Islamic gods...yet social mobility is possible, whether through marriage strategies or individual enterprise (Pelras 1998:25).

Perasaan individualitas mereka yang amat kuat lebih menonjol bila diperhatikan fakta bahwa masyarakat Bugis adalah salah satu masyarakat di kepulauan nusantara yang amat kompleks dan secara hirarkis amat ketat, dengan strata yang berbeda terdiri dari beberapa tingkat kebangsawanan, yang anggota-anggota tertingginya adalah keturunan 'darah-putih' dari dewa-dewa masa pra-Islam... tetapi mobilitas sosial dimungkinkan, apakah melalui strategi-strategi perkawinan atau usaha individual (Pelras 1998:25).

Menurut Jacqueline Lineton (1975), berdasarkan penelitiannya di Wajo pada tahun 70-an, pertentangan antara keinginan untuk mobilitas sosial, dan keterbatasan mobilitas dalam sistem tradisional merupakan faktor penyebab penting yang mendorong mereka merantau.

Cik Hasan Basri (1985) yang meneliti di Wajo pada tahun 1980 mengatakan bahwa walaupun pemerintah daerah berusaha untuk mengurangi kepergian orang-orang Bugis mulai tahun 1969, tetap banyak orang merantau. Menurutnya, hal itu tidak disebabkan oleh kemiskinan, atau kekacauan politik (seperti yang dialami pada era DI). Kesimpulannya, 'Mereka mencari kekayaan yang dapat mengangkat harga diri dan kehormatan mereka dalam pergaulan kemasyarakatan' (Basri 1985:59).

Justru berdasarkan semangat berusaha, orang Sulawesi mengambil peranan penting dalam ekonomi lokal di seluruh nusantara. Misalnya, mereka sering memperkenalkan cara pembentukan modal baru pada masyarakat lain. Peran penting di atas sangat menonjol sesudah kerusuhan di Ambon, terutama dengan susahnyanya distribusi bahan-bahan pokok. Orang-orang Bugis memasok bahan-bahan pokok tsb. melalui 'pasar kaget'. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa perantau Bugis-

Makasar memainkan peran penting dalam pembangunan di beberapa lokasi.⁴

Penting juga untuk diingat bahwa sifat budaya selalu berubah, akibat perilaku manusia. Tidak lagi dapat dipertahankan gagasan bahwa semua perantau Bugis mempunyai cita-cita kembali ke kampung halaman. Banyak pengungsi yang akhir-akhir ini menganggap bahwa kesempatan di Sulawesi Selatan terlalu terbatas dan ingin pindah ke lokasi baru. Bahkan, banyak di antaranya yang sebelumnya sama sekali tidak berminat kembali ke Sulawesi jika tidak karena terpaksa dalam keadaan darurat itu. Dari sudut pandang mereka, mereka mungkin tidak lagi menganggap diri sebagai warga Sulawesi, seperti dikemukakan dalam Tajuk Rencana *Pedoman Rakyat*. Tetapi, banyak juga yang enggan kembali ke tempat di mana mereka menderita kekerasan.

Kembali ke pertanyaan semula, bagaimanakah kita sampai pada pengertian dan penjelasan mengapa terjadi kekerasan, pembunuhan terhadap tetangga? Menurut antropolog Michael Taussig (1987), kita harus memiliki pandangan yang luas untuk menjelaskan pengaruh kekerasan atau teror. Taussig (1987:8) menulis, 'Kita harus mengerti kekerasan/teror supaya kita memahami pengertian orang lain, yaitu "Kenapa mereka benci pada kita?"... "karena mereka tidak mengerti".' Ketakutan sudah mendarah daging. Tetapi yang tidak dipahami dan yang menakutkan adalah kekerasan hasil ciptaan budaya. Taussig mengusulkan bahwa kita harus membongkar hal-hal yang menyangkut mitos, terutama mitos yang menjadikan ketidaksadaran politis zamannya sebagai sesuatu yang alamiah.

Sebagai contoh, Orde Baru kelihatan tertib, tetapi ketidaktertiban selalu ada di belakang layar, terutama ketidaktertiban orang-orang yang berkuasa. Suasana demikian harus digali sebagai sesuatu yang mempengaruhi kebudayaan. Misalnya, rezim Orde Baru melarang pembicaraan atau aksi politik bersifat SARA; akan tetapi, rezimnya sendiri mendiskriminasi orang-orang keturunan Tionghoa. Mereka dilarang memakai bahasa dan namanya, melaksanakan upacara ritual dan lain-lain.

Contoh yang lain adalah *primordialism*, suatu teori bahwa perbedaan manusia, seperti ras dan sukubangsa merupakan sesuatu yang alami, yang akan selalu muncul dalam pergaulan masyarakat. Sebenarnya, teori ini semacam mitos: identitas sosial adalah aspek budaya yang akan selalu berubah.

Menjelaskan teror sebagai unsur konflik sosial

Antropolog Michael Taussig dalam bukunya yang berjudul *Terror, Colonialism and the Wild Man* (1987) menelusuri apakah sebabnya persaingan politik dapat

⁴ Diperkirakan bahwa walaupun penduduk Sulawesi Selatan mencapai sekitar 8 juta, sebanyak 7 juta warga Sulawesi berdiam di luar propinsi.

diwarnai teror; mengapa masyarakat rawan mudah dipengaruhi provokator, rumor dan sebagainya. *'How does terror get a grip on the human heart?'* (Bagaimana rasa takut bisa mendarah daging?), itulah pertanyaan penting yang diajukan Taussig. Menurutnya, kita harus membongkar mitos, terutama mitos yang melekat pada *'political unconscious'* (ketidaksadaran politis); yaitu sesuatu yang tidak disadari yang bisa mempengaruhi perilaku kita, yang bisa menjadikan sesuatu berdasarkan perilaku manusia itu sebagai hal yang alamiah.

Ariel Dorfman, seorang penulis Chile yang menjadi lawan politik Pinochet mengemukakan pertanyaan: 'Bagaimana dapat membangun demokrasi dalam masyarakat di mana negara sudah memakai alat teror atau kekerasan? Bagaimana bisa menumbuhkan perasaan saling mempercayai jika masih ada kemungkinan bahwa orang yang pernah disiksa dapat saling berhadapan dengan orang yang pernah menyiksanya?' Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian menjadi dasar cerita untuk sandiwara yang dikarangnya, berjudul *Death and the Maiden* (1991).

Menurut Dorfman, penting sekali bagi jiwa demokrasi bahwa suatu masyarakat harus menghadapi akibat-akibat penyiksaan, dan menghukum mereka yang pernah menyiksa sesamanya. Dorfman dikritik oleh rekan-rekan dari sayap kiri politik yang mau mempertahankan pendapat bahwa pada jaman pasca-Pinochet, masyarakat Chile harus *forgive and forget*—memaafkan dan melupakan—dan menjalankan proses pembangunan demokrasi.

Tetapi, pada tahun 1998, Dorfman menerbitkan buku baru—riwayat hidupnya—di mana dia berkomentar mengenai zaman Allende (Presiden dari sayap kiri politik yang dipilih masyarakat sebelum kudeta yang mengakibatkan berkembangnya kekuasaan Pinochet). Pada waktu itu, Dorfman dan rekan-rekannya menjadi orang yang berkuasa di Chile:

I came to understand the dread our opponents must have lived through as they saw their world collapse. But at the time ...I really did not care if they were scared. The truth is, we came to enjoy their fear, the thrill that power over them and their destiny gave us ...We did not realize how that fear would grow until we were bloated into monsters in their mind, monsters who must be destroyed (Dorfman 1998: 259).

Saya dapat mengerti perasaan takut yang dialami lawan kami pada waktu mereka menyaksikan 'dunianya' runtuh. Tetapi, pada waktu itu, saya tidak peduli apakah mereka takut. Sebenarnya, lama-kelamaan kami malah menikmati ketakutan mereka, bagaimana ketakutan itu menguasai mereka, mengendalikan nasib mereka. Kami tidak mengerti bahwa ketakutan mereka makin bertambah, sehingga dalam bayangan mereka kami tumbuh menjadi raksasa, raksasa yang harus dibinasakan (Dorfman 1998: 259).

Bagaimana jalan ke luar dari 'lingkaran setan' berdasarkan teror dan kekerasan; dari ruang maut yang bertopengkan persaingan politik berdasarkan perasaan iri hati, dan persaingan ekonomi di mana perbedaan antara golongan diterangkan dengan memakai mitos *primordialism*? Bagaimana menuju demokrasi yang bebas dari kekerasan?

Langkah pertama yang diperlukan adalah meninggalkan atau menolak pembedaan berdasarkan sukubangsa, ras, dan agama sebagai sesuatu yang nyata. Patut disimak bahwa perdebatan di Konstituante pada tahun 50-an gagal menciptakan konstitusi baru. Pertimbangan mereka berdasarkan 'mitos' lain, yaitu *the Universal Declaration of Human Rights*, bahwa manusia pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kita hanya dapat membayangkan bagaimana sejarah Republik Indonesia berlangsung bila Indonesia dulu memilih jalan itu (yaitu betul-betul mempertahankan inti dari Sumpah Pemuda), dibandingkan dengan sejarah Orde Baru yang menekankan perbedaan antargolongan (walaupun di belakang topeng Pancasila), dan bukan kesamaan hak. Ketegangan dan kekerasan antarsukubangsa yang dialami di zaman reformasi harus dipahami sebagai salah satu unsur 'warisan Orde Baru', bukan sebagai sesuatu yang berakar di dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam mengonsolidasikan kekuasaannya atas bangsa Indonesia, rezim Suharto mempraktikkan gerakan ganda: melarang pembicaraan tentang perbedaan etnis di satu pihak, sementara di pihak lain, menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan pemilahan dan pembedaan dalam upaya memenuhi tujuan akhir dari dominasinya. Hasil dari upaya Orde Baru ini—yakni konsolidasi kekuasaan yang tidak bertahan lama, dan yang dijalin secara rapuh di bawah bendera perjuangan nasionalis—telah terpecah-belah ketika kekuasaan negara ditantang. Perbedaan telah diciptakan dan dimanipulasi oleh ideologi yang hegemonik dan praktik-praktik otoriter dari Orde Baru. Kekerasan dan pelanggaran aturan hukum merupakan bagian yang integral dari upaya mewujudkan kekuasaan. Warisan Orde Baru ini ternyata bertahan lama, dan mengancam gerakan reformasi yang demokratis yang telah menantang kekuasaan hegemoninya.

Kepustakaan

- Acciaoli, G.
1989 Searching for Good Fortune: the Making of a Bugis Shore Community at Lake Lindu, Central Sulawesi. Thesis Ph.D. tidak dipublikasikan. Canberra: Department of Anthropology, The Australian National University.
1998 'Bugis Entrepreneurialism and Resource Use: Structure and Practice', *Antropologi Indonesia* 22(57):81-91.
- Basri, C.H.
1985 'Kalola: Sebuah Desa yang Pernah Ditinggalkan Banyak Penghuninya', dalam P. Mukhlis dan K. Robinson (peny.) *Migrasi*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Unhas Untuk Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Hal. 6-61.
- Cohen, Margot
1998 Far Eastern Economic Review.

- Cribb, R. (peny.).
1990 *The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali*. Monash Papers on Southeast Asia No 21. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Dorfman, A.
1991 *Death and the Maiden: A Play in Three Acts*. London: Nick Hern.
1998 *Heading South, Looking North*. Sceptre Paperback.
- Lineton, J.
1975 'Pasompe' Ugi': Bugis Migrants and Wanderers', *Archipel* 10:173-201.
- Mattulada, H.A.
1975 'Kepemimpinan pada Orang Makassar', *Berita Antropologi* 9:32.
- Naim, M.
1979 *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pelras, C.
1998 'Bugis Culture: A Tradition of Modernity', dalam K. Robinson dan M. Paeni (peny.) *Living through Histories: Culture, History and Social Life in South Sulawesi*. Canberra: Department of Anthropology, RSPAS, ANU in association with the National Archives of Indonesia.
- Taussig, M.
1987 *Terror, Colonialism and the Wild Man*. Chicago and London: Chicago University Press.